

MODEL LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MARAHAI PITU

¹Mersy Yoselin Ririhena, ²Frets Alfret Goraph

¹Prodi Ilmu Akuntansi, Universitas Halmahera, Indonesia

²Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Halmahera, Indonesia

E-mail: alfretgoraph9@gmail.com

ABSTRAK

Laporan keuangan menjadi kewajiban setiap lembaga yang menggunakan anggaran untuk dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder terkait. Tujuan pembuatan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pitu yaitu Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes Marahai Pitu terkait tata kelola keuangan Bumdes; Pengurus BUMDes, memiliki pengetahuan baru setelah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan laporan keuangan BUMDes. Metode pelaksanaan ada dua bentuk yaitu: Metode ceramah dan metode Pelatihan. Metode ceramah yaitu tim PKM memberikan ceramah terkait Model Laporan Keuangan BUMDes Marahai Pitu. Metode Pelatihan yaitu pengurus BUMDes Marahai Pitu diberikan Pelatihan membuat Laporan Keuangan Bumdes berbasis akuntansi keuangan dan standar prosedur keuangan. Hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat bersama Mitra BUMDes dan Tim PKM yaitu Tersedianya model laporan keuangan BUMDes, Standar layanan Laporan Keuangan BUMDes, Standar layanan wahana permainan anak-anak, Tata tertib/himbauan bagi wisatawan, dan tersedia sarana prasarana pariwisata yang memadai.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Standar Layanan, dan Tata Kelola BUMDes.

ABSTRACT

Financial reports are the obligation of every institution that uses the budget to be reported in a transparent and accountable manner to related stakeholders. Purpose of making Pitu Village Owned Enterprises (BUMDes) financial reports, namely Mening the management of BUMDes Marahai Pitu regarding the financial management of BUMDes; BUMDes management, has new knowledge after participating in technical guidance activities and training on BUMDes financial report. There are two forms of implementation methods; lecture method and training method. The lecture method, namely the PKM Team giving lectures related to the Marahai Pitu BUMDes financial report. Model training method

namely the management of the Marahai Pitu BUMDes being given training making BUMDes financial statements based on financial accounting and standart financial procedures. The results of the implementation of community service with BUMDes partners and PKM teams, namely the availability of BUMDes financial report models. BUMDes financial report service standards lava for children's games. Procedures/appeals for tourists and adequate tourism infrastructure.

Keywords: Financial Statements, Service Standards, and Governance of BUMDes.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau lembaga sebagai wujud memberikan informasi keuangan kepada orang lain dalam bentuk transparansi keuangan. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa BAB III pasal 12 ayat 3 bahwa Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan [1]. Setiap kegiatan BUMDes yang meningkatkan pendapatan harus membuat laporan keuangan secara transparan dan akuntabel [2].

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Dalam hal ini BUMDes juga membutuhkan pertanggungjawaban keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan [3]. Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat agar dapat menjangkau berbagai sektor keuangan [4]. Dengan meningkatnya pendapatan BUMDes maka laporan pertanggungjawaban keuangan harus dibuat transparan kepada pemerintah desa dan stakeholder terkait. penyusun stantar laporan akuntansi, agar laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut [5].

Selanjutnya kemampuan menyusun laporan keuangan yang dimiliki pelaku usaha berpengaruh terhadap pelaku usaha dimana pelaku usaha akan kesulitan untuk memperoleh pinjaman modal dari pihak ketiga [6]. Secara kelembagaan BUMDes Pitu dituntut harus mampu memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dialokasikan pemerintah desa maupun hasil pendapatan BUMDes sendiri. Akuntansi adalah sistem informasi yang

mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan [7].

Keuangan BUMDes Pitu tahun 2019 mengalami kenaikan kurang lebih 50-85 jt pertahun. Sumber pendapatan BUMDes didapat dari layanan sarana yang disediakan. Setidaknya pemerintah desa mampu melaksanakan amanat peraturan yang berlaku yaitu dengan membangun Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian warganya serta mampu menambah keuangan kas desa guna memajukan kesejahteraan masyarakat desa [8].

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat penting untuk dilaksanakan bersama mitra yang bertujuan yaitu pengurus BUMDes Marahai Pitu memiliki model laporan keuangan, dan tata kelola keuangan BUMDes yang baik; Pengurus BUMDes, memiliki pengetahuan baru setelah berpartisipasi dalam, pembuatan Standar layanan, penataan sarana prasarana pariwisata, Pantai wisata pantai Pitu memiliki tata tertib/Himbauan bagi wisatawan sehingga tercapai tata kelola BUMDes mandiri dan sejahtera.

PERMASALAHAN PRIORITAS MITRA

Adapun permasalahan prioritas yang ditemukan dan telah disepakati MITRA bersama Tim PKM yaitu:

- 1) Mitra masih kesulitan membuat laporan keuangan BUMDes.
- 2) Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Pertanggungjawaban keuangan BUMDes.
- 3) Bertambahnya wahana permainan anak-anak (3 buah) maka perlu dibuat SOP pelayanan wahana.
- 4) Tidak ada tata tertib/himbauan bagi wisatawan lokal (pengunjung) terkait: Dilarang buang sampah sebarangan; dilarang MIRAS, NAPZA, dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa anjing di lokasi wisata.

SOLUSI PERMASALAHAN

Terdapat empat prioritas permasalahan Mitra yang akan dicarikan solusi pemecahan masalah yaitu:

- 1) Mitra masih kesulitan membuat laporan keuangan BUMDes.
- 2) Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Pertanggungjawaban keuangan BUMDes.
- 3) Bertambahnya wahana permainan anak-anak (3 buah) maka perlu dibuat SOP pelayanan wahana.
- 4) Tidak ada tata tertib/himbauan bagi wisatawan lokal (pengunjung) terkait: Dilarang buang sampah sebarangan; dilarang MIRAS, NAPZA, dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa anjing di lokasi wisata.

Berdasarkan empat prioritas permasalahan Mitra maka Tim PKM memberikan solusi pemecahan masalah sebagai berikut:

- 1) Tim PKM membuat bimtek dan pelatihan/praktek membuat model laporan keuangan BUMDes yang melibatkan seluruh badan pengurus BUMDes Pitu, pemerintah desa, BPD, dan stakeholder terkait.
- 2) Tim PKM membuat praktek/pelatihan membuat SOP Laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes, turut melibatkan seluruh badan pengurus BUMDes, Pemerintah desa, BPD, dan stakeholder terkait.
- 3) Tim PKM membuat praktek/pelatihan membuat SOP layanan wahana permainan bagi anak-anak, serta turut melibatkan seluruh badan pengurus BUMDes, Pemerintah desa, BPD, dan stakeholder terkait.
- 4) Tim PKM membuat praktek/pelatihan membuat tata tertib/himbauan bagi pengunjung, misalnya larangan buang sampah sembarangan, dilarangan mengkonsumsi Miras, NAPSA, dilarang membawa anjing di lokasi wisata; dilarang membawa senjata tajam, dan lain sebagainya. Praktek ini turut melibatkan seluruh badan pengurus BUMDes, Pemerintah desa, BPD, dan stakeholder terkait untuk membahas tatib tersebut

METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan kegiatan dibutuhkan metode pelaksanaan kegiatan PKM sebagai berikut:

Tahapan Perencanaan:

- 1) Persiapan/Survey.
- 2) Pengantara surat dan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan PKM.

Tahapan Pelaksanaan:

- 1) Bimbitang Teknis (Bimtek) terkait Tugas dan fungsi Direktur dan Bendahara terkait tata kelola laporan keuangan BUMDes; Tugas dan fungsi badan pengurus BUMDes lainnya untuk peningkatan pengetahuan terhadap tanggungjawab. Pentingnya Analisis Keuangan BUMDes, Arus kas Masuk/keluar berdasarkan peraturan yang berlaku; Pentingnya Standar Layanan laporan keuangan, wahana permainan anak-anak, membuat tata tertib pengunjung. Pentingnya seluruh kegiatan diikuti oleh pengurus BUMDes, pemerintah Desa, BPD, dan stakeholder terkait.
- 2) Praktek/Pelatihan terkait Praktek membuat model laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes; Membuat SOP/Standar layanan Laporan Keuangan; Membuat SOP/Standar Layanan Wahana Permainan anak-anak; Membuat Tata Tertib

Pengunjung pada sarana lokasi baru; Seluruh kegiatan diikuti oleh pengurus BUMDes, pemerintah Desa, BPD, dan stakeholder terkait.

Tahapan Evaluasi Program

- 1) Tahapan Evaluasi bersama dilakukan oleh seluruh pengurus BUMDes, Pemerintah Desa, BPD, Pemilik warung, stakeholder, bersama dengan tim PKM terkait semua proses dari awal kegiatan sampai akhir pelaksanaan kegiatan PKM dengan cara berdiskusi, dan curah pendapat dalam pertemuan. Dari hasil pertemuan dijadikan dasar Mitra mengambil kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- 2) Desa Pitu sebagai desa Mitra universitas Halmahera maka pengawasan, evaluasi, dan keberlanjutan dilakukan bersama baik pemerintah desa, BPD, badan penguru BUMDes, guna mencapai kesejahteraan social.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Program Kemitraan Masyarakat yang dilakukan tim PKM Bersama Mitra BUMDes Marahai Pitu. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu *Tahap Perencanaan*. Pada tahap ini Tim PKM mengidentifikasi bahan-bahan kebutuhan kegiatan; Tim berkoordinasi dan menyusun rencana kerja PKM; survey, pengantaran surat kegiatan, berkoordinasi, dan berdiskusi dengan badan pengurus BUMDes, pemerintah desa, BPD, Pemilik warung terkait persiapan kegiatan PKM. Perlu dijelaskan bahwa dengan diberlakukan Kebijakan New Normal pun pemerintah desa, BPD, pemilik warung dan stakeholder terkait masih takut berpartisipasi bersama-sama dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada dua bentuk kegiatan yaitu Ceramah dan Pelatihan. Kegiatan Ceramah terkait Model Laporan Keuangan dari perspektif teori keuangan dan kesesuaian dengan kebutuhan laporan keuangan BUMDes (Mitra). Pemateri kegiatan ceramah yaitu Ibu Mersy Ririhena. Kegiatan diikuti oleh dua orang yaitu Direktur dan Bendahara BUMDes sedangkan dari Tim PKM 5 orang.

Gambar 1. Materi Ceramah Laporan Keuangan



Pengelolaan keuangan BUMDes harus dibarengi dengan Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dalam menunjang pengelolaan keuangan dan usaha pariwisata yang lebih baik [9]. Untuk kegiatan pelatihan ada dua bentuk yaitu Pelatihan Keuangan BUMDes, dan pelatihan standar operasional prosedur laporan keuangan dan wahana permainan. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan pada Pemerintah dan stakeholder terkait.

Gambar 2. Pelatihan membuat Laporan Keuangan BUMDes Marahai Pitu



Materi pelatihan antara lain Buku Data Transaksi, Buku Jurnal, Buku Kas Masuk, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Laba Rugi, Buku Daftar Pengelompokan Rekening, Buku Kas Keluar. Pemateri pada pelatihan disampaikan oleh Ketua Tim Mersy Ririhena, Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal, 24 – 26 Juni 2020 di ruang kelas PAUD jam 09.00 – 13.00 WIT dan hanya diikuti oleh Direktur dan Bendahara BUMDes Marahai Pitu.

Gambar 3. Pelatihan dan Pembahasan SOP, dan Tatib Wisatawan



Gambar 4. Tatib/Himbauan bagi Pengunjung



Lembaga pemerintah dan privat dapat dikatakan efektif dan akuntabel untuk membangun organisasinya apabila perangkat aturan terlebih dahulu disiapkan guna menjamin penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien [10]. Pelatihan standar operasional prosedur wahana permainan dilaksanakan pada tanggal, 28 Juni 2020 di ruang

kelas PAUD pada jam 09.00 – 13.00 WIT yang dihadiri oleh Tim PKM 5 orang dan Direktur bersama Bendahara BUMDes 2 orang. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Himbauan bagi wisatawan berisi larangan buang sampah, larangan membawa dan mengkonsumsi NAPZA; larangan membawa anjing di lokasi wisata; larangan mengkonsumsi minuman keras di lokasi wisata. Kegiatan pelatihan tersebut disampaikan oleh anggota tim PKM, Frets A. Goraph.

Gambar 5. Pengerjaan Pengecetan Tempat Wisata Tahap pemberdayaan social (tahap pengerjaan sarana pariwisata)



Tahap pemberdayaan social dilaksanakan sejak tanggal, 30 Juni – 16 Juli 2020, tempat pengerjaan sarana pariwisata di lokasi wisata pantai. Proses pengerjaan sarana wisata dibantu oleh 5 orang dari Tim PKM, Karang Taruna 4 orang, dan pengurus BUMDes 2 orang. Sarana pariwisata yang dikerjakan berupa renovasi dan Pengerjaan Pengecetan Tempat Wisata, dan Himbauan bagi pengunjung. Prasarana wisata yang akan dikembangkan pada lokasi studi wisata Pantai terdiri atas prasarana umum [11]. Pengembangan pariwisata pantai sangat penting guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pariwisata menjadi kunci keberhasilan dan meningkatkan minat wisatawan mengunjungi tempat pariwisata [12].

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Tim PKM bersama Mitra Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Marahai Pitu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ceramah dan pelatihan laporan keuangan BUMDes dapat meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes; meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan membuat laporan keuangan, penataan sarana prasarana pariwisata lebih bagus dan wisatawan yang berkunjung lebih banyak sehingga tata kelola keuangan pengurus BUMDes lebih mandiri dan mencapai kebaikan bersama.

Saran bagi pengelola Pariwisata pantai Desa Pitu yaitu pengurus BUMDes sering berlatih dalam membuat laporan keuangan harus menggunakan standar akuntansi keuangan baik itu laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan serta terus menjaga sarana prasarana dan kebersihan lingkungan wisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyertai kegiatan tim PKM sehingga dapat terlaksana. Terima kasih kami sampaikan kepada:

- 1) Menteri RISTEKDIKTI/BRINT yang telah memberikan kesempatan kepada Tim PKM Universitas Halmahera untuk diberikan anggaran Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Tahun 2020.
- 2) Pemerintah Desa Pitu, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Marahai Pitu, Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemilik Warung, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tim PKM yang telah mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Universitas Halmahera yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
- 4) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Kristen Indonesia Maluku yang telah menerbitkan jurnal pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Menteri, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa," Jakarta, 2015.
- [2] P. P. Harto, "Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, pp. 167-188, 2018.
- [3] D. Irawati, "Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)," in *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, Jember, 2017.
- [4] T. d. Badriatin, "Pemasaran produk umkm binaan pada pasar keuangan rakyat," *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, pp. 149-153, 2018.
- [5] Y. N. W. Suratman, "Pendampingan Penyusunan Aplikasi Laporan Keuangan Masjid Yang Akuntabel Sesuai PSAK 45," *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, pp. 139-147, 2019.
- [6] A. M. A. D. C. S. B. L. Siti Sumartiah, "Meningkatkan Skill Berwirausaha Melalui Manajemen Keuangan Online, Inovasi Produk, Penjualan Online, Dan Handycraft," *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)*, pp. 181-188, 2019.
- [7] I. Kema, "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado," *Jurnal EMBA*, pp. 771-781, 2011.
- [8] S. Goraph, "Metode Partisipatif Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pitu Maluku Utara," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, pp. 2-6, 2019.
- [9] K. E. Candraningsih, "Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Pp. 24-32, 2018.
- [10] K. P. A. N. d. R. Birokrasi, "Pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan," Jakarta, 2012.
- [11] A. W. M. C. E. Wahyu Narendra Kusuma Wardana, "Identifikasi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Wisata Berdasarkan Persepsi Pengunjung Di Pantai Sipelot Kabupaten Malang," Malang, 2018.
- [12] M. Syarifah Dina Fajriah, "Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan)," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, pp. 218-233, 2014.